



KR-Wahyu Imam Ibad

**Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto memberikan sambutan di Kelompok Tani Ngesti Mulyo Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari.**

## TERKAIT PROGRAM PIPANISASI Titiek Kunjungi Sukoharjo

**SUKOHARJO (KR)** - Pertanian di Kabupaten Sukoharjo dinilai sudah maju, terbukti dengan produktivitas tertinggi kedua nasional. Keberhasilan tersebut salah satunya karena didukung program pompanisasi. Hal ini menarik perhatian Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati atau Titiek Soeharto secara khusus mengunjungi Kabupaten Sukoharjo.

Kegiatan digelar di Kelompok Tani Ngesti Mulyo Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari Sukoharjo, baru-baru ini. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, mitra kerja dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, Pupuk Indonesia, dan lainnya. Titiek Soeharto mengatakan Komisi IV DPR RI sengaja datang ke Kabupaten Sukoharjo untuk melihat secara langsung keberhasilan pertanian. Keberhasilan pompanisasi di Kabupaten Sukoharjo dengan hasil peningkatan produktivitas pertanian diharapkan bisa diterapkan di daerah lain di Indonesia.

"Petani memiliki peran penting. Kita dorong terus upaya peningkatan produktivitas pertanian. Targetnya mampu swasembada beras. Khusus untuk saluran irigasi, Titiek Soeharto menekankan tentang pentingnya kebersamaan dalam melakukan perawatan. Kita punya program minta ke Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, untuk perawatan saluran irigasi dan bendungan. Kalau perlu direvitalisasi," tandas Titiek.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Agus Santosa dalam sambutannya mengatakan, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu penyangga pangan Jawa Tengah. "Meskipun memiliki luas wilayah terkecil nomor 2 dari bawah setelah Kudus, Sukoharjo tetap konsisten mempertahankan lahan pertanian, sehingga sampai saat ini masih memiliki sawah seluas 20.496 hektare yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. "Produktivitas padi di Kabupaten Sukoharjo selalu nomor 1 di Jawa Tengah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, bahkan di tahun 2023, produktivitas padi kami nomor 2 nasional," jelasnya. (Mam)-f

## HUJAN DERAS DI SUKOHARJO Banyak Pohon Tumbang



KR-Dok BPBD Sukoharjo

**Pohon tumbang terkena angin kencang melintang jalan di depan kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo.**

**SUKOHARJO (KR)** - Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (16/11) siang hingga sore hari. Akibatnya banyak pohon tumbang hingga melintang jalan. Dampaknya arus lalu lintas kendaraan di beberapa tempat sempat terputus sebelum akhirnya berhasil dibuka setelah tim gabungan melakukan penanganan.

"Kerusakan juga terjadi disekeliling bangunan akibat hujan deras dan angin kencang. Atas kejadian tersebut, tim gabungan langsung melakukan penanganan," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo, Ariyanto Mulyatmojo. Menurutnya, hujan deras disertai angin kencang terjadi di sejumlah kecamatan. Di antaranya Sukoharjo, Bendosari, Mojolaban, Polokarto, Grogol, Kartasura, Gatak dan Baki.

Pohon tumbang antara lain terjadi di Jalan Jaksa Agung R Soeprapto atau depan kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Jalan Rajawali Sukoharjo, Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo, depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo.

Ariyanto menjelaskan, tim gabungan yang berasal dari sejumlah pihak mulai BPBD, SAR, Polri, TNI, relawan dan lainnya sudah bergerak turun ke lapangan membantu masyarakat. Petugas juga bekerja keras membuka akses jalan yang sempat tertutup pohon tumbang. BPBD Sukoharjo juga sudah mengirim surat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Camat se-Kabupaten Sukoharjo, terkait permohonan pemotongan pohon dan dahan lebar.

Surat tersebut dikirim BPBD Sukoharjo menindaklanjuti informasi prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 20 September 2024, bahwa awal musim hujan di Kabupaten Sukoharjo terjadi pada bulan Oktober 2024 dengan perkiraan durasi musim hujan terjadi selama 19-21 dasarian atau 6-7 bulan. (Mam)-f

BUPATI YUNI AJAK ASN NONTON BARENG

## Sragen Punya Gedung Bioskop Lagi

**SRAGEN (KR)** - Belasan tahun vakum, akhirnya Kabupaten Sragen punya bioskop lagi, yakni Platinum Cineplex yang lokasinya di gedung lantai 2 Atrium Plaza. Lokasi gedung bioskop tersebut dekat Alun-alun Sasana Langen Putra atau depan Kantor Bupati Sragen di Jalan Raya Sukowati.

Peresmian pembukaan bioskop dilakukan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Jumat (15/11). "Dulu Sragen memiliki banyak bioskop, tapi karena kondisi industri perfilman sepi, bioskop pun ikut tutup. Alhamdulillah kali ini ada lagi bioskop, semoga warga Sragen senang dan bisa menikmati hiburan," kata Yuni, sapaan Bupati Sragen saat peresmian bioskop.

Peresmian dimulainya operasional bioskop Plat-

inum Cineplex ditandai dengan nonton bareng (no-bar) bersama Bupati dan jajaran ASN, dengan film berjudul Dosa Musyrik. Film yang dibintangi Marthino Lio dan Pritt Timothy itu membuat detak jantung penonton meningkat, bahkan sampai ada penonton ampai menjerit-jerit karena ketakutan.

"Kursinya nyaman, dingin, sampai tidak berani keluar karena horor filmnya. Seram. Settingnya Jawa banget. Untung tidak Minggu Pon. Soalnya itu weton saya. Ayo-ayo, nonton, nonton, ya. Sekarang Sragen punya Platinum Cineplex yang luar biasa. Tidak kalah dengan bioskop-bioskop di Solo. Daripada jauh-jauh ke Solo, mendingan lihat di bioskopnya Sragen," ungkap Yuni.

Yuni mengaku biasa menonton bersama anak



KR-Said Masyuki

**Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati bersama rombongan ASN nonton bareng di Studio Platinum Cineplex Sragen.**

bungunya di Solo. Dia mengaku baru kali pertama menonton di Platinum Cineplex Sragen dan ternyata fasilitasnya tidak kalah dengan XXI, justru lebih bagus. Dia berharap jangan sampai kasus penutupan bioskop di Sragen terulang kembali. "Atrium ini ke depan bisa menjadi pusat bisnis Sragen. Lokasinya strategis dan didukung adanya Alun-

alun yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Nanti bekas kantor pemda lama juga akan dijadikan ruang terbuka yang nyaman. Infrastruktur lainnya mudah-mudahan bisa dilanjutkan bupati yang baru nanti," tambahnya. Direktur Platinum Cineplex, Amit Jethani berterima kasih kepada warga Sragen yang memberi ruang bagi PT Platinum

Cinema membuka bioskop baru. Dia berharap bioskop ini dapat menjadi nostalgia karena dulu pernah ada bioskop di gedung ini juga. "Kami sudah buka satu pekan dan antusias masyarakat luar biasa. Ini menjadi momentum yang pas untuk buka bioskop di Sragen," kata dia.

Menurut Amit Jethani, sejauh ini animo penonton di Sragen dinilai bagus. Dalam sehari jumlah penonton yang datang bisa sampai 300-400 orang. "Jumlah penonton itu ternyata di luar dugaan. Animo warga luar biasa. Kalau dibandingkan dengan Platinum Cineplex lainnya, Sragen ini salah satu yang di luar dugaan. Konsepnya Sragen ini semi stand alone, beda dengan di Solo yang berada di dalam mal. Mayoritas memang dari milenial dan generasi Z," jelasnya. (Sam)-f

TIM GABUNGAN SUDAH GELAR APEL SIAGA BENCANA

## Grogol-Mojolaban Paling Rawan Banjir

**SUKOHARJO (KR)** - Kecamatan Grogol dan Mojolaban menjadi dua wilayah paling rawan banjir luapan Sungai Bengawan Solo. Prioritas penanganan akan dilakukan melibatkan tim gabungan. Meskipun demikian, tidak hanya Sungai Bengawan Solo yang harus diwaspadai. Sungai-sungai lainnya tetap harus diwaspadai karena juga rawan banjir saat musim hujan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Widodo mengatakan kerawanan bencana alam banjir menjadi prioritas perhatian dalam penanganan tim gabungan di Kabupaten Sukoharjo. Kondisi tersebut terjadi setelah adanya peningkatan curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. "Hujan deras sudah terlihat dampaknya dengan peningkatan debit air. Di sisi lain, warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai juga sudah melakukan kewaspadaan," jelasnya.

Khusus untuk wilayah Kecamatan Grogol dan

Mojolaban, telah dilakukan pemetaan. Artinya, pada saat bencana alam banjir terjadi maka lokasi evakuasi warga, dapur umum dan kebutuhan selama dipengungsian telah ditentukan. Hal ini sama seperti dalam penanganan banjir tahun sebelumnya. "Pemerintah kecamatan, desa hingga RT dan RW selalu dilibatkan dalam penanganan banjir. Ini untuk memastikan warga sudah dibantu," ungkap Widodo.

Sebelumnya, tim gabungan juga melaksanakan apel siaga bencana di halaman Pemkab

Sukoharjo, Kamis (14/11). Personel dan peralatan yang dibutuhkan dalam



KR-Wahyu Imam Ibad

**Forkopimda Sukoharjo saat mengecek peralatan penanganan bencana alam.**

15.229 ANAK DI BANYUMAS TIDAK BERSEKOLAH

## Dindik Sosialisasi Atasi Masalah Pendidikan

**BANYUMAS (KR)** - Di Kabupaten Banyumas saat ini ada sekitar 15.229 anak diketahui tidak bersekolah. Anak sebanyak itu tersebar di 27 kecamatan. Menanggapi permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyelenggarakan Sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) di Ruang Hastinapura Java Heritage Purwokerto, Rabu (13/11).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengatasi tingginya angka anak yang tidak bersekolah di Kabupaten Banyumas. Acara tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banyumas, Nungky Harry Rachmat, dan dihadiri oleh berbagai instansi terkait, camat, kepala desa, serta pengawas SD, SMP, dan PAUD se-Kabupaten Banyumas.

"Dari data Dinas Pendidikan Banyumas,

tercatat 15.229 anak tidak bersekolah di 27 kecamatan," jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Sarno. Menurutnya, dengan jumlah anak tidak sekolah tersebut merupakan tantangan besar yang perlu perhatian dan dukungan dari berbagai pihak.

Sarno juga menjelaskan bahwa kategori anak tidak bersekolah mencakup mereka yang sejak awal tidak pernah mengenyam pen-

didikan formal, termasuk anak-anak disabilitas, hingga mereka yang putus sekolah di tengah jalan. Diharapkan, dengan adanya sosialisasi ini semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk mencari solusi komprehensif. "Kami sengaja mengundang para camat dan kepala desa agar penanganan masalah ini bisa lebih menyentuh hingga ke tingkat akar rumput," tandasnya.

Penjabat Bupati Banyu-

mas Iwanuddin Iskandar melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir. "Jumlah 15 ribu anak yang tidak sekolah bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan tantangan besar yang harus kita hadapi bersama. Anak-anak ini memiliki masa depan yang bisa terganggu jika tidak mendapatkan pendidikan yang layak," ungkapnya.

Sosialisasi tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan kolaborasi lintas sektor. "Kami ingin memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah hingga keluarga, turut berperan aktif dalam upaya mengatasi masalah ini," lanjutnya.

Selain pendekatan formal, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas juga menawarkan solusi

melalui pendidikan nonformal. Kepala Seksi Dikmas dan Kursus, Werdiningsih, menyatakan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bisa menjadi alternatif bagi anak-anak yang putus sekolah. Kabupaten Banyumas sendiri memiliki 42 PKBM, termasuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang siap menampung anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan melalui jalur kesetaraan, seperti program Kejar Paket A, B, dan C.

"Saat ini jumlah siswa pendidikan kesetaraan di Banyumas mencapai 5.332 orang. Mereka tersebar di Kejar Paket A, B, dan C. Kami berharap PKBM bisa menjadi jembatan bagi anak-anak yang sempat terputus dari pendidikan formal agar dapat kembali belajar dan mengembangkan potensi mereka," tutur Werdiningsih. (Dri)-f



KR-Dok Dindik Banyumas

**Sosialisasi penanganan anak tidak bersekolah di Purwokerto.**

## RAPBD 2025 Sukoharjo Ditetapkan Menjadi Perda

**SUKOHARJO (KR)** - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025 resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), setelah dilakukan penandatanganan persetujuan bersama Pemkab dan DPRD Sukoharjo. Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto mengatakan APBD 2025 Kabupaten Sukoharjo selanjutnya dapat digunakan.

Penetapan Raperda menjadi Perda APBD 2025 dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pengajuan usulan, pembahasan dan tahapan lainnya sesuai ketentuan berlaku. "Pemkab dan DPRD su-

dah dikejar waktu untuk segera menyelesaikan pembahasan Raperda APBD 2025, mengingat tahun 2024 segera berakhir," jelas Nurjayanto.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Agus Santosa mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD disam-

paikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat tiga hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD harus dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota.

"Mengenai pendapat, saran, serta imbauan yang disampaikan oleh para anggota dewan, baik melalui pandangan umum fraksi, rapat-rapat Badan Anggaran, rapat-rapat Komisi dan Rapat Paripurna, saya menyampaikan terima kasih. Selanjutnya akan kami pelajari dan tindaklanjuti

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Agus Santosa.

Menurutnya, Rancangan APBD Tahun Anggaran Sukoharjo tersebut disusun secara elektronik, terintegrasi dengan tahapan perencanaan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi e-planning dan e-budgeting melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Mam)-f